

Pasang Surut Kuasa Bangsawan dalam Proses Demokratisasi di Bone

Ernawati
(Peneliti Ladem Institute)
Email: ernajpp28@gmail.com

Abstract

This paper will analyze the power of the nobles who had differences in the results of the executive and legislature in Bone regency. The argument that the authors have built is the persistence of aristocratic power in the executive, but declined in the legislature due to several things, one of which, the declining power of Golkar in the legislature. Although, basically remained in power Golkar executive evident during the Election Day since 2003 in the district Bone current period (2013-2018) the candidate regent and deputy regent who win elections have never stretcher parties other than Golkar. Golkar Party, the nobility, and Bone did have a close bond complex to be separated. Bone is a barn Golkar in South Sulawesi.

Keywords: Bone, Nobleman, Golkar

Abstrak

Tulisan ini akan menganalisa kuasa bangsawan yang mengalami perbedaan hasil pada eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bone. Argumen yang penulis bangun adalah bertahannya kuasa bangsawan di eksekutif namun menurun di legislatif disebabkan beberapa hal, salah satunya, menurunnya kuasa Golkar di legislatif. Meskipun, pada dasarnya kuasa Golkar masih bertahan di eksekutif terbukti selama pelaksanaan Pilkada sejak 2003 di Kabupaten Bone hingga periode sekarang (2013-2018) pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memenangkan Pilkada belum pernah usungan partai selain Golkar. Partai Golkar, bangsawan, dan Bone memiliki ikatan erat yang rumit untuk dipisahkan.

Kata kunci: Bone, Bangsawan, Golkar

PENDAHULUAN

Dulu, warna kuning bagi Kerajaan Bone sangatlah ditinggikan. Pakaian adat berwarna kuning hanya boleh dipakai oleh kalangan bangsawan sedangkan bagi yang non-bangsawan akan dikatakan melanggar jika memakai pakaian adat warna kuning. Pakaian adat dengan warna tertentu telah ditentukan oleh adat untuk kalangan non-bangsawan. Namun, hal tersebut sudah mengalami pergeseran. Pakaian adat warna kuning, tidak

harus dikenakan oleh bangsawan, namun non-bangsawan juga sudah diperbolehkan.

Beberapa saat yang lalu, sejarah warna kuning kembali bergema di Bone sehingga beberapa media cetak dan online mengambil tema besar 'Bone Menguning'. Ketika Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Golkar yang dilaksanakan pada 21-22 Oktober 2016. Para elit golkar dan organisasi sayap Golkar berdatangan ke Bone untuk mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Bone belum bisa lepas

dari julukan lumbung besar Golkar di Sulawesi Selatan.

Selintas tidak ada hubungan antara pakaian adat warga kuning yang hanya bisa digunakan bangsawan dengan Golkar yang juga berwarna kuning. Namun, kekuatan simbol ini menjadikan adanya kecenderungan memperoleh suara banyak ketika bangsawan diusung Golkar pada saat Pilkada, begitu juga pada Pilleg. Sayangnya, kecenderungan bangsawan ini menemui kondisi dilematisnya, ditemukannya perbedaan hasil pada eksekutif dan legislatif. Bangsawan mempertahankan kekuasaannya di eksekutif namun merosot secara signifikan di legislatif. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Jika betul bahwa Bone adalah lumbung suara Golkar di Sulawesi Selatan, maka hal pasti yang menjadi pertanyaan besar dalam tulisan ini adalah, betulkah merosotnya kuasa Golkar di Bone menjadi penyebab adanya perbedaan hasil kuasa bangsawan di eksekutif dan di legislatif? Ataukah jangan-jangan ada penyebab lainnya?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini akan menggunakan data wawancara dengan beberapa tokoh bangsawan dan non-bangsawan sekaligus memegang jabatan terpenting di Golkar Bone. Tulisan ini juga banyak dilengkapi data dari KPUD Bone dan beberapa data dari internet yang berkaitan dengan tema yang saya usung.

Tulisan ini akan diurai dengan sistematika sebagai berikut; pertama, aktor bangsawan sebagai penguasa; kedua, mengungkapkan hubungan dekat antara Golkar dan bangsawan di Bone; ketiga, power bangsawan di Bone; keempat, menganalisis perbedaan hasil kuasa bangsawan di eksekutif dan legislatif dengan menggunakan instrumen yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan studi literatur. Dengan melihat pasang surut kuasa Bangsawan dalam proses demokratisasi yang berlangsung di Bone. Beberapa sumber daya yang digunakan bersumber dari laporan resmi pemerintah, seperti laporan resmi KPU dan Badan Pusat Statistik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktor Bangsawan sebagai Penguasa

Mappangara (2013) pernah menuliskan tentang demokrasi di bumi bangsawan lewat keresahannya dalam menyoroti penyebab berkuasanya bangsawan hingga kandidat calon bupati yang muncul pada Pilkada 2013 adalah kalangan bangsawan. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya para bangsawan ini menguasai kepemilikan modal berupa tanah dan menguasai perekonomian yang menjadikan non-bangsawan patuh dan tunduk kepada bangsawan. Hal inilah yang berlanjut hingga sekarang yang melahirkan kepatuhan luar biasa kepada bangsawan yang sebelumnya dilekati dengan kelayakan dan kepantasan berkuasa. Mappangara sudah sejak awal menyayangkan bahwa banyaknya partai politik seperti tidak ada pilihan lain kecuali mengusung kandidat dari kalangan bangsawan di Pilkada.

Bagi partai politik di Bone, mengusung bangsawan pada Pilkada merupakan jalan aman untuk mendulang suara. Hal ini dikarenakan partai politik tidak mau mengambil resiko ketika mengusung aktor non-bangsawan sementara kandidat lainnya berasal dari kalangan bangsawan. Bahkan pada dua periode terakhir, aktor non-bangsawan hanya diposisikan pada calon wakil bupati. Pada Pilkada 2008 ada Abdul Azis Halid sebagai pasangan calon bupati Andi Mangunsidi. Pada Pilkada 2013 ada Ambo Dalle sebagai pasangan calon bupati Andi

Fahsar serta ada Sumardi sebagai pasangan calon bupati Andi Mangunsidi.

Lain halnya dengan Haboddin (2009) dan Azis (2012) yang menyoroiti kuasa Karaeng (gelar kebangsawanan Bugis-Makassar) di Jeneponto. Menurut Haboddin (ibid: 61-84), basis kuasa yang dimiliki oleh Karaeng diantaranya sumber daya ekonomi (penguasaan tanah dan usaha garam), politik (distribusi proyek dan jabatan), kultural (paggaukang dan politik kekerabatan). Sementara menurut Azis ada beberapa temuan Azis yakni: adanya penguasaan pada modal-modal politik pada karaeng, yakni: penguasaan pengetahuan mitos Tomanurung dengan kepemilikan lontaraq; basis ekonomi dengan penguasaan tanah, distribusi jabatan atas dasar jaringan kekeluargaan; kuatnya tradisi kekaraengan dimana masyarakat sangat permisif akan hal ini.

Dari Jeneponto kemudian beralih ke Pinrang, Razak (2014) juga pernah menuliskan tentang kontestasi Andi (gelar kebangsawanan Bugis) di Pinrang. Para kandidat kepala daerah tahun 2013 yang muncul adalah pertarungan antar Andi. Razak melihat adanya dilematik terhadap eksistensi kesolidan kelompok bangsawan ini dalam demokrasi lokal. Andi tidak menunjukkan kesolidan pada saat kontestasi Pilkada yang notabeneanya berasal dari satu rumpun keluarga. Hal ini bisa disamakan dengan yang terjadi di Bone. Persaingan antar kerabat merupakan hal lumrah dan dikuasai oleh kalangan bangsawan.

Dari Sulawesi Tenggara, ditulis oleh Mas'ud (2015), tepatnya di Buton ada persaingan kaum Kaomu-walaka (bangsawan) dan kaum Katobengke (non-bangsawan). Bentuk perlawanan kau non-bangsawan ini adalah dengan mendominasi kursi legislatif, mereka melakukan maksimalisasi ruang demokratis bernegara, resistensi lewat jalur pendidikan, resistensi dengan menggunakan simbol negara/militer, lewat jalur politik. Sementara kaum Kaomu-walaka tetap

mempertahankan wacana kekuasaannya, privilese, daprestisanya melalui status tradisionalnya pada masa kesultanan.

Dari beberapa tulisan yang mengangkat tema besar tentang bangsawan didapatkan bahwa kuasa bangsawan memang merupakan kuasa tradisional yang terbentuk dari masa kerajaan yang telah runtuh. Namun, dalam dinamika politik dengan sistem demokrasi ini, para bangsawan bertransformasi menjadi penguasa pada pemilihan secara demokratis yakni dengan memanfaatkan kepatuhan-kepatuhan masyarakat sebagai bentuk kelayakan dan kepantasannya dalam berkuasa.

Namun dibanding dua kerajaan besar lainnya di Sulawesi Selatan (Kerajaan Luwu dan Gowa), apa yang terjadi di Bone adalah betul pertahanan bangsawan bahkan pada calon bupati yang bermunculan. Fenomena daerah lain, yang juga pernah kuat kuasa bangsawannya, sudah terbiasa dengan paket calon bupati-calon wakil bupati dengan komposisi non-bangsawan-bangsawan, Bone belum pernah terjadi hal serupa. Hal ini menandakan Bone belum siap dipimpin oleh aktor non-bangsawan. Para kandidat pada tiga kerajaan besar tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Pasangan Calon pada Tiga Kabupaten (dulunya Kerajaan Besar) di Sulawesi Selatan.

Kab.	No.Urut &Pasangan Calon Pilkada	Terpilih
Gowa (2015)	1. Andi Maddusila Andi Idjo Wahyu Permana Kaharuddin 2. Sjahrir Sjafruddin Dg.Jarung Muh.Anwar Usman 3. Djamaluddin Maknun Masjkur 4. Tenri Olle Yasin Limpo Hairil Muin 5. Adnan Purichta Ichsan YL Abdul Rauf Mallaganni	5

Luwu (2013)	1. Basmin Mattayang Syukur Bijak 2. Andi Mudzakkar Amru Saher 3. Basri Suli Thomas Toba	2
Luwu Timur (2013)	1. Nur Husain Esra Lamban 2. Badaruddin A Piccunan Andi Baso Makmur 3. Muh. Thorieq Husler Irwan Bahri Syam	3
Luwu Utara (2013)	1. Indah Putri Indriani Thahar Rum 2. Arifin Junaidi Andi Abdullah Rahim	1
Bone (2013)	1. Andi Mustaman Andi Sultan Pawi 2. Andi Muh. Irsan Idris Galigo Andi Muh. Yuslim Patawari 3. Andi Taufan Tiro Andi Promal Pawi 4. Andi Fahsar M Padjalangi Ambo Dalle 5. Andi Mappamadeng Dewang Andi Said Pabokori 6. Andi Mangunsidi Sumardi	4

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (internet dan KPUD Bone)

Tabel 1 menunjukkan Bone kekuatan bangsawan masih dipupuk meski telah ada institusi modern (partai politik) yang bertugas merekrut kader baik bangsawan maupun non-bangsawan untuk dipersiapkan maju Pilkada. Dengan kata lain, demokratisasi tidak memberi efek jera pada dominasi bangsawan di Bone. Kuasa bangsawan untuk menjadi kandidat calon bupati di Bone sulit ditembus karena tertanam sangat kuat yang menyebabkan seperti tidak ada pilihan lain selain mengusung aktor bangsawan ini. Para aktor non-bangsawan hanya bisa jadi ekor dengan mengikuti arah politik aktor bangsawan. Ada kecenderungan ketika berbeda arah politik antara aktor bangsawan

berhadapan dengan aktor bangsawan lainnya adalah persaingan, tetapi ketika berhadapan dengan aktor non-bangsawan adalah adanya kepatuhan pada kelayakan kuasa bangsawan.

Ada cerita yang menunjukkan hal tersebut. Ada satu momentum ketika Ambo Dalle harus berhadapan dengan dua bangsawan yang membesarkannya di organisasi kepemudaan, yakni Andi Mangunsidi (Kandidat Pilkada Bone 2003-2008) dan satunya lagi adalah ketuanya di organisasi politik, Golkar, Andi Idris Galigo. Sebagai kader Golkar sekaligus loyalis, keberpihakannya pada Andi Idris sebagai ketua Golkar dengan alasan bahwa keduanya mengalami resiko namun tidak berpihak pada partai tentu memiliki resiko yang jauh lebih besar. Maka pada momentum tersebut, Ambo Dalle mendukung Andi Idris dalam Pilkada 2003 dan tidak memberi dukungan kepada Andi Mangunsidi yang juga saat itu menjadi kandidat Pilkada 2003. Kondisi lainnya yang kemudian membuat kesetiaannya pada Andi Idris diuji. Pada tahun 2008, Ketua Golkar di Bone masih Andi Idris Galigo yang akan mencalonkan diri untuk kedua kalinya di Pilkada Bone. Andi Fahsar yang saat itu sebagai wakil bupati juga ingin mencalonkan diri dan dipanggillah Ambo Dalle sebagai calon wakil bupati Andi Fahsar yang pada saat itu didukung oleh PDIP dan beberapa partai lainnya. Ambo Dalle yang pada saat itu sebagai sekretaris Golkar enggan mencederai jubahnya dan menunjukkan kesetiaannya pada Andi Idris.

Tetapi pada waktu Pilkada 2013, Ambo Dalle masih menjabat sebagai ketua DPRD dan Andi Idris tidak lagi Ketua Golkar, maka disetujui untuk mendampingi Andi Fahsar maju dalam Pilkada Bone 2013. Peta politik ini dibaca karena pada saat itu, Andi Fahsar diberikan kunci Golkar oleh Nurdin Halid sehingga Ambo Dalle merasa aman jika tidak mendukung anak Andi Idris yang juga tersiar kabar akan mengusung anaknya, Andi Irsan, maju lewat jalur independen pada

Pilkada 2013. Berhadapan dengan pilihan-pilihan politik ini menunjukkan adanya kuasa bangsawan atas kuasa non-bangsawan yang sebenarnya waktu itu bisa saja memilih untuk tidak mendukung siapapun. Namun, karena adanya resiko yang dipertimbangkan sangat matang, maka yang didukung adalah calon yang diusung Golkar sebagai modal terbesar dengan menunjukkan sikap loyalitas kepadanya.

Dari sini terlihat bagaimana elit bangsawan memainkan pola kekuasaan yang bersifat tradisional (Fahmid dkk, 2012) yang kemudian menjadi dogma bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Ijzereef (dalam ibid) mengemukakan bahwa masyarakat Sulsel adalah masyarakat yang sangat hierarkis, yang tersusun berdasarkan 'kemurnian darah' kebangsawanan. Selain itu, modal jaringan yang dibentuk oleh aktor bangsawan di Bone adalah dengan memberikan jabatan kepada sejumlah loyalisnya atau tim pemenangannya terutama pada birokrasi. Pada masa pemerintahan Andi Idris di periode kedua dia memutasi beberapa pejabat yang dianggapnya telah mendukung lawan dalam Pilkada yakni Andi Fahsar. Kemudian, pada Pilkada 2013 Andi Fahsar memenangkan Pilkada, merupakan momentum untuk membalas yang telah dilakukan oleh Andi Idris. Sejumlah loyalis yang pernah dinonjobkan oleh Andi Idris, kini menduduki jabatan penting sementara loyalis Andi Idris disingkirkan dengan dinonjobkan dan terlebih 27 camat positif diganti dan sebagian besar akan berpindah ke struktur dinas alias nonjob (Sindo 11/07/13). Praktik balas jasa politik ini dinilai ampuh untuk menjaga jaringan. Maka dari itu, yang dilakukan oleh pejabat, yang dulunya menantang Andi Fahsar, agar tidak terkena mutasi adalah dengan melakukan pendekatan dan menunjukkan sikap loyalitasnya (Tribun Timur, 14/03/2013).

Hubungan Dekat antara Golkar dan Bangsawan di Bone

Pada masa Orde Baru, Golkar mengukuhkan kekuatannya dengan menggaet militer dan bangsawan. Strategi ini sangat ampuh untuk mendulang suara bahkan Bone pernah menyumbang 90% lebih suara untuk Sulawesi Selatan (Ratnawati dalam Haris, 2004) Kemudian tumbangnya Orde Baru menyebabkan militer dalam tubuh Golkar di Bone juga turut tumbang dengan berakhirnya masa jabatan Kol. Andi Amir dan digantikan oleh Andi Idris Galigo pada Pilkada 2003 yang berhasil memimpin Bone selama dua periode secara berturut-turut diusung oleh Golkar. Kemudian pada Pilkada 2013, dimenangkan oleh Andi Fahsar yang diusung oleh Golkar yang sebelumnya mengalami kekalahan dan didukung oleh PDIP dan 12 partai lainnya.

Golkar di Bone pernah dikendalikan oleh Andi Idris selama 37 tahun sebelum direbut oleh Nurdin Halid yang kemudian memberikan kunci kendalinya pada Andi Fahsar. Meskipun berbeda orang yang mengendalikan namun tetap yang mengendalikan Golkar adalah kalangan bangsawan. Romantisme ini dibangun agar menjaga eksistensi bangsawan sebagai pengendali utama Golkar. Tabel di bawah ini menunjukkan ketua Golkar selama periode awal hingga sekarang ini, menunjukkan adanya kedekatan kuat dengan bangsawan. Selama periode itu berganti-ganti ketua Golkar di Bone namun tetap diisi oleh kalangan bangsawan.

Tabel 2 Bangsawan Ketua Partai Golkar Tiap Periode

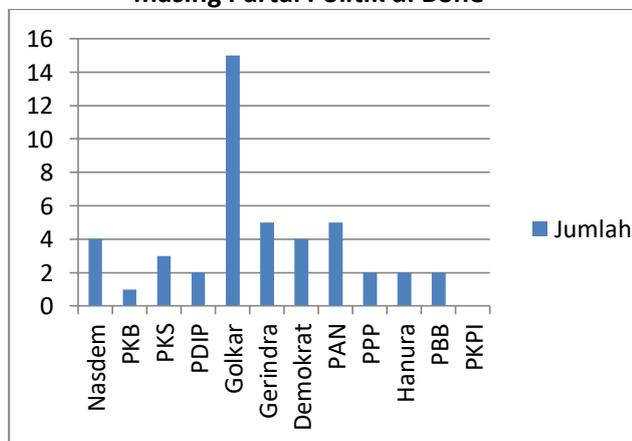
Periode	Ketua Golkar Bone
...	Andi Sebbu
1971-1978	Andi Sebbu
1978-1983	Andi Dadi
1983-1988	Andi Pattikkeng
1988-1993	Andi Bachtiar
1993-1998	Andi Haruni

1998-2004	Andi Muh. Idris Galigo
2004-2009	Andi Muh. Idris Galigo
2009-2013	Andi Muh. Idris Galigo
2013-sekarang	Andi Fahsar M Padjalangi

Sumber: Diolah dari hasil penelitian Rahman, 2013

Tabel di atas menunjukkan kuasa bangsawan dalam tubuh Golkar belum beranjak. Bahkan belum pernah satu periode Golkar diketuai oleh kalangan non-bangsawan. Jika Haboddin dalam tulisannya tentang tiga pandangan politik, salah satunya yakni partai politik diyakini dapat merepresentasikan latar belakang sosial masing-masing, misalnya partai Golkar identik dengan 'Golongan Karaeng'. Artinya hal sama jika dilihat dari segi ketua Golkar tiap periode di Bone, kaum bangsawan mampu mempertahankan hegemoninya dengan tetap mengetuai partai Golkar. Sayangnya, di tengah kejayaan Golkar dan bangsawan, ada kecenderungan penurunan yang dialami oleh Golkar sebagai kendaraan politik yang paling diandalkan oleh bangsawan pada masa Orde Baru. Meskipun suara Golkar masih mendominasi pada Pilleg 2014 tetapi mempertahankan hegemoni ini ternyata telah membuat Golkar terlena. Partai baru seperti Gerindra dan NasDem pelan tapi pasti merebut masing-masing 5 dan 4 kursi DPRD.

Diagram 1 Perolehan Kursi DPRD 2014 Masing-masing Partai Politik di Bone



Sumber: Data diolah dari KPUD Bone

Diagram 1 di atas menunjukkan dominasi Golkar yang berhasil memperoleh 15 kursi (periode sebelumnya 18), diikuti oleh Gerindra dan PAN sebanyak 5 kursi. Kemudian Nasdem dan Demokrat masing-masing 4 kursi dan PKS sebanyak 3 kursi. Lalu, PPP, Hanura, dan PBB sebanyak 2 kursi dan terakhir PKB yang memperoleh 1 kursi saja. Artinya, sepertiga kursi di DPRD Bone masih dikuasai oleh Golkar meskipun pernah 80% dan 50% menguasai DPRD. Keberhasilan Golkar dalam membangun hegemoni politik mengakar pada kebangsawanan Bone yang terpelihara dan berpengaruh dalam dinamika politik Bone (Zuhro dkk, 2009). Akar hegemoni ini masih bisa dikatakan kuat dan mendominasi meskipun menurun. Pada saat runtuhnya Orde Baru, dari yang sebelumnya Bone menyumbang 90% menjadi 66,5%. Memudarnya Golkar di Bone ditandai dengan jumlah kursi di legislatif selama empat periode terakhir, yakni; (1) 1999-2004 yakni 33 kursi; (2) 2004-2009 yakni 28 kursi; (3) 2009-2014 yakni 18 kursi; dan (4) 2014-2019 yakni 15 kursi.

Pada empat periode tersebut, Golkar di Bone dipimpin oleh para bangsawan yang tidak lain merupakan saudara sepupu, yakni Andi Idris Galigo yang mengendalikan Golkar selama 37 tahun lalu digantikan oleh Andi Fahsar Mahdin Padjalangi sejak 2013 hingga sekarang. Di Bone, pertarungan antar kerabat sangat lumrah. Pada Pilkada yang berlangsung pada 2008, tiga calon bupati yang muncul yakni Andi Idris, Andi Fahsar, dan Andi Mangunsidi adalah saudara sepupu dekat. Begitu juga dengan Pilkada 2013, enam pasangan calon bupati yang muncul yakni Andi Mustaman, Andi Irsan, Andi Taufan Tiro, Andi Fahsar, Andi Mappamadeng, dan Andi Mangunsidi juga merupakan kerabat bahkan ada yang keponakan (Andi Fahsar dan Andi Irsan). Hal ini menunjukkan Pilkada masih dikuasai oleh para bangsawan dan kerabatnya. Pada Pilleg, hubungan dekat Golkar dengan bangsawan

bisa dilihat pada nomor urut tiap calon legislatif yang diusung oleh Golkar tiap dapil. Bisa disimak pada tabel berikut ini. Pilleg 2014. Tabel di bawah ini diolah berdasarkan nomor urut 3 teratas.

Tabel 3 Nomor Urut (3 teratas) Caleg Partai Golkar pada Pilleg 2014

Dapil	Nama Calon	No.Urut
1	Andi Ikbal Amal	1
	Andi Ryad Baso Padjalangi	2
	Andi Annisari Moestapha	3
2	Andi M.Amin Mangussara	1
3	Andi Sukmawati	1
	Andi Atoro	2
	Andi Mansur Muhtar	3
4	Andi Alimin Rahman	1
	Andi Aldi Burhanuddin	3
5	Andi Akbar Yahya	2
	Andi Irma Alisyahbana	3

Sumber: Data KPUD Bone

Tabel Pilleg 2014 di atas menunjukkan hampir semua dapil dimana Golkar menempatkan aktor bangsawan pada urutan-urutan awal. Dapil 1, 2, 3, 4 kecuali Dapil 5 aktor bangsawan berada di urutan pertama lalu diikuti pada nomor urut 2 dan 3. Kekuatan politik yang dibangun Golkar pada Pilleg 2014 adalah kelanjutan dari Pilleg pada masa Orde Baru. Aktor bangsawan dianggap sebagai penarik perolehan suara jika ditempatkan pada urutan-urutan pertama. Namun, bila dibandingkan dengan periode sebelumnya ada perbedaan strategi yang dibangun oleh Golkar. Bahkan aktor bangsaan di nomor urut awal tidak sebanyak yang dibangun pada Pilleg 2014. Artinya, Golkar pada Pilleg 2009 dan 2014 mengalami peningkatan strategi.

Tabel 4 Nomor Urut (3 teratas) Caleg Partai Golkar pada Pilleg 2009

Dapil	Nama Calon	No.Urut
1	Andi Annisari Moestapha	2
2	Andi Irma Alisyahbana	3
3	Andi Jacub Galigo	1

4	Andi Terwo Pabokori	1
	Andi Irwansyah	2
5	Andi Ikbal Amal	1
	Andi Herman Mappesangka	2
	Andi Sinar AL	3

Sumber: Data diolah dari KPUD Bone

Strategi Golkar dengan menambah kekuatan bangsawan pada nomor urut awal tidak memberikan dampak yang signifikan. Hal ini dibuktikan dari nama-nama di atas yang terpilih tidak lebih dari 50%. Bahkan yang memperoleh suara terbanyak adalah para bangsawan yang berada di nomor urut bukan awal.

Tabel 5 Caleg Bangsawan Golkar yang terpilih pada Pilleg 2009

Dapil	Nama Caleg Terpilih	No.Urut
1	Andi Annisari Moestapha	2
	Andi Veran Pawi	7
2	Andi Irma Alisyahbana	3
	Andi Akbar Yahya	4
3	Andi Ulfana Promal Pawi	4
	Andi Alimin Rahman	6
4	Andi Terwo Pabokori	1
	Andi Amin Mangussara	4
5	Andi Ikbal Amal	1
	Andi Mansur Muhtar	8
	Andi Sukmawati	10

Sumber: Data diolah dari KPUD Bone

Tabel 6 Caleg Bangsawan Golkar yang terpilih pada Pilleg 2014

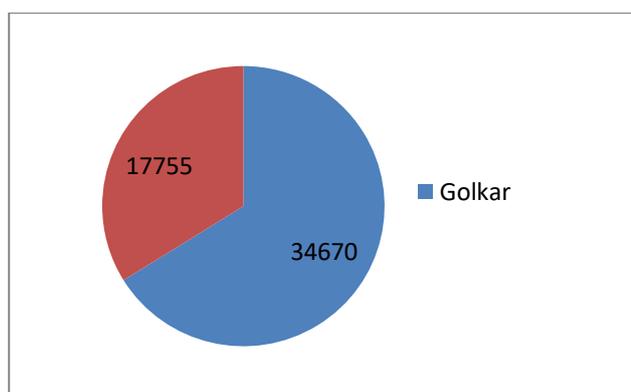
Dapil	Nama Caleg Terpilih	No.Urut
1	Andi Ryad Baso Padjalangi	2
	Andi Sulam Mangampara	6
2	Andi M. Amin Mangussara	1
3	Andi Atoro	2
	Andi Yusuf Akbar	5
4	Andi Mappanyukki Takka	4
5	Andi Akbar Yahya	2
	Andi Muh.Idris Alang	7

Sumber: Data diolah dari KPUD Bone

Bahkan pada Pilleg 2014, bangsawan yang diusung oleh Golkar pada nomor urut 1, hanya 1 yang terpilih. Hal ini menunjukkan

Golkar cenderung mengkolaborasikan bangsawan dengan non-bangsawan dalam tubuh partainya. Dari 16 aktor bangsawan di DPRD periode 2014 tercatat hanya 8 di antaranya yang diusung oleh Golkar sementara 8 lainnya diusung oleh partai lain. Hal ini menunjukkan bahwa pasca Orde Baru yang mendominasi hanya Golkar ternyata aktor bangsawan juga sudah dilirik oleh partai lain. Meskipun tingkat elektabilitas tidak setinggi dengan aktor bangsawan yang diusung oleh Golkar. Diagram di bawah ini menunjukkan hal tersebut.

Diagram 2
Perbandingan Jumlah Suara Caleg Bangsawan Terpilih yang Diusung Partai Golkar dengan Partai Lain Pada Pilleg 2014



Sumber: Diolah dari data KPUD Bone

Bangsawan di tubuh partai selain Golkar bisa dilihat pada diagram di atas. Golkar yang mengusung bangsawan jumlah perolehan suara mencapai 34.670 sedangkan yang bukan Golkar berjumlah 17.755 suara dengan jumlah masing-masing 8 aktor bangsawan. Angka ini menunjukkan adanya peluang-peluang baru sekitar 50% dari partai lain yang mengusung Golkar. Hal ini sejalan dengan temuan dari Tim LIPI (2009) bahwa dampak dari multipartai menyatakan bahwa aktor-aktor politik tidak selalu harus berasal dari partai Golkar yang selama masa pra-Reformasi merupakan hegemoni politik di Bone. Namun, diversifikasi politik masih terlalu sempit dan kurang kuat untuk

mengusik dan menantang hegemoni politik Golkar. Ternyata jalan atau strategi yang digunakan oleh partai lain adalah dengan mengusung aktor bangsawan yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi.

Strategi ini dianggap sebagai jalan aman untuk memperoleh suara. Atau strategi ini justru merupakan strategi dari aktor bangsawan sendiri yang tidak diakomodir oleh Golkar akhirnya beralih ke partai lain. Sekitar 20% keluar dari Golkar tapi ada juga yang masuk Golkar (wawancara dengan Ambo Dalle, Wakil Bupati Bone). Dari sini saya bisa membangun argumen, bahwa perolematika terbesar yang dialami bangsawan selain mengalami penyusutan kekuasaan, ada kesan yang terlalu terlena dengan kebesaran kuasa bangsawan partai Golkar. Persaingan antar keluarga di level Pilkada, membuat suara keluarga terpecah, begitu juga pada Golkar, beberapa aktor memilih keluar dari Golkar dan mendapat kursi DPRD pada partai lain.

Akibat dari penetapan Andi Fahsar-Ambo Dalle sebagai paket calon bupati dan calon wakil bupati Pilkada 2013, sejumlah pengurus DPD II Golkar Kabupaten Bone mundur. Hal ini karena beberapa pengurus tidak menerima hasil survey. Bahkan Andi Idris terpaksa harus keluar dan mencalonkan anaknya, Andi Irsan, lewat jalur independen. Meskipun putra mahkota, namun hal tersebut tidak berpengaruh dalam mendulang suara, Andi Irsan hanya berhasil 97.255 suara dibanding Andi Fahsar yang diusung Golkar 191.524 suara. Hal ini menunjukkan bahwa calon bupati dari kalangan bangsawan namun tidak diusung Golkar maka kemungkinan kecil untuk menang. Sebaliknya calon bupati dari kalangan bangsawan namun diusung Golkar maka kemungkinan besar untuk menang.

Diusung Partai Golkar pada Pilkada adalah modal besar untuk memperoleh suara dominan. Bahkan dua tahun sebelum Pilkada 2013, Golkar menjadi incaran enam kandidat

bupati. Mereka adalah Andi Mangunsidi, Andi Fahsar, Andi Irsan, Andi Sultan Pawi, Andi Syamsiar, serta Ambo Dalle (Tribun Timur, 21/12/11). Pengincaran ini dilakukan oleh kandidat agar hasil survey menguntungkan bagi mereka sehingga diusung Golkar. Golkar bisa dikatakan menjadi pilihan pertama bagi aktor bangsawan untuk maju di Pilkada, namun ketika hasil survey berkata lain mereka bisa memilih tetap berada di Golkar atau beralih ke partai lain. Inilah yang terjadi pada Andi Mangunsidi, Andi Irsan, dan Andi Sultan Pawi yang memilih ke partai lain.

Melihat perpecahan yang terjadi pada tubuh Golkar di Bone. Maka Syahrul Yasin Limpo memilih mengawal Pilkada dimana Golkar mengusung Andi Fahsar. Namun, yang bisa saya baca disini adalah adanya kekuatan dua saudara sepupu dari kalangan bangsawan yang memperebutkan kuasa Golkar. Golkar sebagai partai dengan kekuatan besar tentu sudah dibaca oleh para kandidat. Bahwa siapapun diusung Golkar kemungkinan besar menang. Serta Golkar juga masih menggunakan konsep lama bahwa Golkar di Bone harus di bawah kendali bangsawan. Maka inilah yang diperebutkan oleh kedua saudara sepupu ini, bagaimana agar Golkar berpihak padanya.

Basis Kuasa Bangsawan di Bone

Berdasarkan hasil penelitian oleh Tim LIPI, menemukan bahwa sejarah pemerintahan Bone mewariskan seperangkat tradisi politik yang mengakar kuat di masyarakat hingga saat ini. Pertama, kaum bangsawan Bone dihormati dan dipatuhi karena mewarisi kebesaran dan kewibawaan To Manurung yang membawa kedamaian, keadilan, dan memberikan kesejahteraan masyarakat Bone yang kemudian dimanfaatkan oleh para bangsawan untuk menanamkan pengaruhnya. Kedua, sejak masa kejayaan Kerajaan Bone, dimana Raja-Raja yang pernah memerintah Bone berasal dari kaum bangsawan berpengaruh pada

pemerintahan Bone, dimana jabatan-jabatan penting dikuasai oleh bangsawan. Ketiga, meskipun Bone sudah sejak lama memiliki tradisi memilih pemimpin namun kelayakan dan akses kontestasi jabatan kepemimpinan hanya terbatas pada kalangan bangsawan.

Meskipun bangsawan mengalami penurunan jumlah kursi di DPRD, namun jabatan strategis masih ditempati oleh mereka. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7
Jabatan Strategis Aktor Bangsawan dari Golkar di Legislatif Bone 2014

No.	Nama	Jabatan	Partai
1.	Andi Akbar Yahya	Ketua DPRD	Golkar
2.	Andi M Amin Mangussara	Ketua Komisi I (Pemerintahan)	Golkar
3.	Andi Muh.Idris Alang	Ketua Komisi II (Ekonomi & Keuangan)	Golkar
4.	Andi Nursalam Nawir	Ketua Komisi III (Pembangunan)	PAN
5.	Andi Ryad Baso Padjalangi	Ketua Komisi IV (Kesra)	Golkar

Sumber: kpu.go.id

Tabel di atas menunjukkan bahwa strategi politik bangsawan dan Golkar yang semakin mengalami penurunan yakni dengan menempatkan para bangsawan dari Golkar untuk mendominasi jabatan-jabatan strategis yakni Ketua DPRD dan Ketua Komisi.

Basis kuasa aktor bangsawan

Sejak dulu, bangsawan berkuasa karena harta dan tahtanya. Kita mengambil contoh pada Pilkada 2013, laporan harta kekayaan para kandidat meliputi uang tunai, aset berupa barang bergerak, dan barang tidak bergerak, serta harta kekayaan lain yang sah. Andi Taufan Tiro dengan jumlah kekayaan Rp 22 Milyar lebih dan pasangannya Andi Promal Pawi sebanyak Rp 7 Milyar lebih. Pasangan ini (ATT Pro) keluar

sebagai paslon terkaya pada Pilkada 2013 bila dijumlahkan mencapai Rp 30 Milyar lebih.

Paslon terkaya kedua adalah pasangan Andi Fahsar dan Ambo Dalle (non-bangsawan). Ambo Dalle melebihi jumlah kekayaan Andi Fahsar yang hanya mencapai Rp 2 Milyar lebih sementara Ambo Dalle Rp 11 Milyar lebih. Hal ini menurut seorang narasumber, dikarenakan Ambo Dalle selama 2 periode menjabat sebagai ketua DPRD dan dia memiliki lahan dan hewan ternak yang mencapai ratusan. Bila kekayaan Andi Fahsar dan Ambo Dalle dijumlahkan maka akan mencapai Rp 13 Milyar lebih.

Pasangan lainnya yakni Andi Mangunsidi dan Sumardi Sulaeman (non-bangsawan). Hal sama juga terjadi pada pasangan ini, dimana non-bangsawan melebihi kekayaan bangsawan. Sumardi Sulaeman memiliki kekayaan sebanyak Rp 11 milyar lebih dan terlampau jauh dengan Andi Mangunsidi yang hanya sekitar Rp 600 juta lebih. Sumardi merupakan direktur sebuah perusahaan di Makassar. Hal ini dirasa menguntungkan bagi Andi Mangunsidi didampingi oleh seorang pengusaha kaya.

Pasangan selanjutnya adalah Andi Mustaman dan Andi Sultan Pawi yang bila dijumlah harta kekayaan mereka mencapai Rp 11 milyar lebih. Kemudian, ada pasangan Andi Irsan (anak Andi Idris) bersama pasangannya masing-masing memiliki harta kekayaan Rp 2 milyar dan Rp 700 juta lebih. Pasangan yang memiliki harta kekayaan paling sedikit di antara 6 paslon adalah Andi Mappamadeng Dewang dan Andi Said Pabokori yang bila dijumlah harta kekayaan mereka kurang dari Rp 2,9 M.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa para aktor bangsawan memiliki harta kekayaan yang melimpah disebabkan sebelum menjabat mereka memiliki background sebagai anggota DPRD, pengusaha, birokrat, wakil bupati, camat, dan kepala desa. Background-background ini memungkinkan mereka mampu mengontrol

perekonomian dengan memenangkan suara. Namun, pasangan Andi Fahsar dan Ambo Dalle memenangkan Pilkada 2013. Sekalipun bila dibandingkan diantara 6 pasangan calon, Andi Fahsar berada di urutan ke-7. Hal ini mungkin dibantu juga oleh pasangannya, Ambo Dalle yang merupakan calon wakil bupati terkaya ke-3 setelah Andi Taufan dan Sumardi. Bagi aktor bangsawan mampu menjaga massanya dengan kharisma yang dimiliki. Dalam tulisan Fahmid dkk (2012) mengatakan bahwa kharisma ini dijadikan ideologi atau mitos sebagai kekuatan elit dalam konteks pertarungan mencapai kekuasaannya.

Perbedaan Hasil Kuasa Bangsawan di Eksekutif dan Legislatif di Bone

Pada masa Orde Baru, bangsawan adalah incaran bagi Golkar untuk membangun hegemoninya di Bone. Namun, yang terjadi pasca Orde Baru adalah partai Golkar menjadi incaran bangsawan Bone. Artinya, terjadi kondisi sebaliknya, diusung oleh Golkar merupakan modal besar para calon (Pilkada dan Pilleg) untuk meraup suara. Hal ini dikarenakan, Golkar masih menjadi the single majority di Bone. Meskipun begitu lekatnya dengan Golkar, kuasa bangsawan di Bone mengalami pasang surut. Menguatnya bangsawan pada eksekutif dengan masih terpilihnya aktor bangsawan bahkan calon bupati yang muncul adalah kalangan bangsawan tidak sekuat yang terjadi pada legislatif. Bisa dikatakan bahwa ini sangat kuat pengaruhnya dari Golkar yang juga mengalami pengurangan kursi secara signifikan pada empat periode terakhir.

Ada problematika terbesar yang dialami bangsawan yang mengalami penyusutan kekuasaan yakni ada kesan terlalu terlena dengan kebesaran kuasa bangsawan atas partai Golkar. Persaingan antar keluarga di level Pilkada membuat suara keluarga terpecah begitu juga dengan

Golkar sehingga beberapa aktor memilih keluar dari Golkar dan mendapat kursi DPRD dengan diusung partai lain.

Problematika Bangsawan di Pilkada 2013

Menurut keterangan salah satu wartawan di Bone bahwa sebelum masuk pada periode 2013-2018, Golkar tidak lagi dikendalikan oleh Andi Idris setelah sebelumnya selama berpuluh tahun memegang kendali Golkar. Kali ini Golkar berada di bawah kendali Nurdin Halid dan diketuai oleh Andi Fahsar. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Golkar, pasangan Andi Fahsar dan Ambo Dalle meraih suara tertinggi. Kekuatan politik yang dibangun Andi Idris berpaling dari Golkar dan memilih jalur independen dengan mengusung anaknya, yang notabenehnya adalah ponakan Andi Fahsar. Jalur independen ini, Andi Irsan Idris Galigo dipasangkan dengan Andi Muh.Yuslim Patawari.

Selain kedua pasangan tersebut, pasangan lainnya antara lain: (1) Andi Mustaman-Andi Sultan Pawi; (2) Andi Taufan Tiro-Andi Promal Pawi; (3) Andi Mappamadeng Dewang-Andi Said Pabokori; (4) Andi Mangunsidi-Sumardi. Pilkada 2013 ini mencerminkan persaingan antar keluarga belum mereda di Bone. Hal ini membuat suara terpecah di antara keluarga dan kekuatan yang terbangun adalah siapa menang siapa kalah. Lebih parahnya lagi, seperti yang saya sebutkan di atas, para kandidat cenderung memilih untuk mengincar dengan harapan meraih hasil survey tertinggi di partai Golkar jika tidak maka kekuatan baru dibangun di partai lain. Para bangsawan masih sangat mendewakan Golkar. Ketika terjadi perpecahan di tubuh Golkar, hal itu dikarenakan terjadinya persaingan antar keluarga yang sama-sama ingin menguasai Golkar.

Problematika Bangsawan di Pilleg 2014

Pada Pilleg 2014 di Bone, para bangsawan dan Golkar harus mengalami kenyataan berupa kemerosotan tajam pada jumlah kursi. Tabel di bawah ini menggambarkan hal tersebut.

Tabel 8
Anggota DPRD Periode 2014-2019 dari
Kalangan Bangsawan
Dapil, Perolehan Suara, Partai Politik

N o.	Nama Anggota DPRD	Da pil	Perolehan Suara	Partai Politik	Jabatan
1.	Andi Ryad Baso Padjalangi	1	5.292	Golkar	Ketua Komisi IV
2.	Andi Samsidar Ishak	1	2.862	Gerindra	Wakil Ketua
3.	Andi Sulam Mangampara	1	2.586	Golkar	Anggota
4.	Andi M. Amin Mangussara	2	3.943	Golkar	Ketua Komisi I
5.	Andi Nursalam Nawir	2	1.987	PAN	Ketua Komisi III
6.	Andi Muh.Saiful	2	1.838	PPP	Anggota
7.	Andi Atoro	3	6.038	Golkar	Anggota
8.	Andi Yusuf Akbar	3	2.872	Golkar	Anggota
9.	Andi Suaedi	3	3.271	Demokrat	Anggota
10.	Andi Taufiq Kadir	3	1.615	NasDem	Wakil Ketua
11.	Andi Muhammad Nur	3	2.101	PBB	Anggota

12	Andi Mappanyukki Takka	4	4.717	Golkar	Anggota
13	Andi Ashar AP	4	1.852	Gerindra	Anggota
14	Andi Akbar Yahya	5	5.360	Golkar	Ketua
15	Andi Muh. Idris Alang	5	3.862	Golkar	Ketua Komisi II
16	Andi Adriana	5	2.229	PAN	Anggota

Sumber: Data diolah dari data KPUD Bone

Dapil 1 yang merupakan daerah perkotaan terdiri dari 4 kecamatan yakni Tanete Riattang Timur, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang dan Palakka, dari 12 partai yang ikut Pilleg di Kabupaten Bone hanya terdapat 33 aktor bangsawan dari 116 caleg dan yang berhasil memperoleh kursi hanya 3 aktor bangsawan yakni Andi Ryad Baso Padjalangi (Golkar), Andi Samsidar Ishak (Gerindra), dan Andi Sulam Mangampara (Golkar). Andi Ryad Baso Padjalangi memperoleh suara terbanyak di Dapil 1, hal ini dikarenakan modal kekerabatan yakni keponakan dari Puang Baso. Selain itu, Andi Ryad adalah Wakil Ketua DPD II Kabupaten Bone.

Dapil 2 terdiri dari Barebbo, Sibulue, Cina, Mare, Tonra, dan Ponre hanya terdapat 35 aktor bangsawan dari 94 caleg. Sama seperti Dapil 1, aktor bangsawan di Dapil 2 hanya mampu memperoleh 3 kursi. Bahkan untuk suara tidak terlalu tinggi dibanding Dapil 1. Golkar, PAN, dan PPP berhasil mendudukkan calon aktor bangsawannya di Dapil 2 ini, mereka adalah Andi M. Amin Mangussara, Andi Nursalam Nawir, dan Andi Muh. Saiful.

Dapil 3 adalah dapil perolehan kursi terbanyak anggota DPRD bangsawan dari 5 dapil. Dari 12 partai mencalonkan 46 aktor bangsawan lalu berhasil memperoleh 5 kursi

di dapil ini. Mereka adalah Andi Atoro (Golkar), Andi Yusuf Akbar (Golkar), Andi Suaedi (Demokrat), Andi Taufiq Kadir (Nasdem), dan Andi Muhammad Nur (PBB). Adapun dapil 3 terdiri dari 6 kecamatan yakni Kahu, Kajuara, Salomekko, Libureng, Bontocani, dan Patimpeng atau biasa disebut Bone Selatan. Jika dilihat pada hal lain, yakni kepala desa terpilih pada Pilkades 2015, bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9 Dapil 3 Persentase Kepala Desa Bangsawan Terpilih di Dapil 3 Pada Pilkades Bone 2015

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Kepala Desa dari Bangsawan	Persentase
1.	Kahu	12	4	33,33%
2.	Kajuara	12	6	50%
3.	Salomekko	6	1	16,7%
4.	Libureng	5	2	40%
5.	Bontocani	8	1	12,5%
6.	Patimpeng	8	2	25%

Sumber: Data diolah dari Bonepos.com

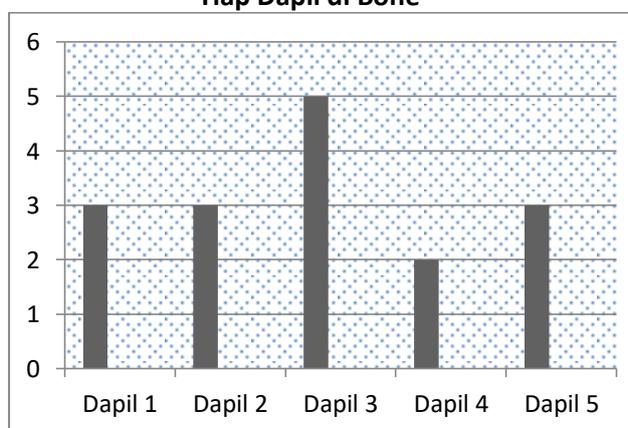
Dibanding dapil yang berada di kota, misalnya dapil 1, Bone selatan sebagai wilayah di Bone untuk mempertahankan kuasa bangsawan. Selain jauh dari kota, prinsip feodalisme masih cenderung relatif kuat di dapil 3 ini. Menurut Ambo Dalle, Kecamatan Kajuara, dengan 50% tingkat perolehan kursi anggota legislatif yang bangsawan juga menurut salah satu narasumber bahwa kepala-kepala desa di sana hampir seluruhnya dari bangsawan. Di sana kebanyakan keluarga dari Jenderal Joesoef, seorang bangsawan yang tidak feodalis namun nasionalis. Meski orang-orang tahu, dia seorang bangsawan tinggi.

Dapil dengan perolehan kursi terendah, 2 kursi untuk aktor bangsawan yakni Dapil 4. Selain itu hanya 10 partai yang mencalonkan aktor bangsawan yang jumlahnya hanya 21 aktor bangsawan. Dapil 4

ini terdiri dari Kecamatan Amali, Ulaweng, Bengo, Lappariaja, Lamuru, dan Tellu Limpoe. Dapil 5 yang terdiri dari Awangpone, Cenrana, Tellu Siattinge, Dua Boccoe, Ajangale. Bangsawan yang berhasil memperoleh kursi yakni Andi Akbar Yahya (Golkar), Andi Muh. Idris Alang (Golkar), dan Andi Adriana (PAN) dari 28 aktor bangsawan yang dicalonkan oleh 12 partai.

Diagram berikut menunjukkan tingkat keterpilihan bangsawan di tiap-tiap dapil. Dapil 3 merupakan dapil perolehan kursi terbanyak oleh aktor bangsawan yakni 5 dari 9 kursi atau sekitar 56%. Sedangkan dapil lainnya, bangsawan hanya mampu memperoleh 3 dari 10 kursi (30%) di dapil 1; 3 dari 8 kursi (37,5%) di dapil 2; 2 dari 8 kursi (25%) di dapil 4; dan 3 dari 10 kursi (30%) di dapil 5.

Diagram 3 Tingkat Keterpilihan Calon Anggota DPRD Periode 2014-2019 Tiap Dapil di Bone



Sumber: Data diolah dari KPUD Bone

KESIMPULAN

Sampai saat ini, Bone masih menjadi lumbung suara partai Golkar. Mendominasinya Golkar di eksekutif dan legislatif adalah bukti kuasa Golkar yang belum terlepas di Bone. Namun, pergeseran kursi Golkar dan bangsawan adalah lebih memperkuat bukti bahwa penurunan Golkar dan bangsawan

merupakan benang merah yang mesti dibaca. Pasca reformasi, bangsawan dalam memperoleh kekuasaan tidak hanya dengan dipayungi oleh Golkar. Meskipun peluang menang lebih besar jika diusung oleh Golkar.

Beberapa jawaban yang bisa ditemukan dalam studi ini adalah: Pertama, persaingan antar keluarga bangsawan menyebabkan internal Golkar terpecah. Hal ini problematika terbesar yang dialami bangsawan selain mengalami penyusutan kekuasaan, ada kesan yang terlalu terlena dengan kebesaran kuasa bangsawan partai Golkar. Persaingan antar keluarga di level Pilkada, membuat suara keluarga terpecah, begitu juga pada Golkar, beberapa aktor memilih keluar dari Golkar dan mendapat kursi DPRD pada partai lain.

Kedua, di tengah menurunnya kursi bangsawan dan Golkar di DPRD 2014, partai baru yakni NasDem dan Gerindra melejit dan mampu mengungguli beberapa partai lama di Bone.

Ketiga, DPRD periode 2014 didominasi oleh pengusaha dan mantan kades. Dari 45 anggota DPRD di Bone 14 di antaranya merupakan pengusaha dari kalangan non-bangsawan sementara 6 diantaranya pengusaha dari kalangan bangsawan. Selain itu, 6 adeg merupakan mantan kades dari kalangan non-bangsawan sementara hanya 3 dari kalangan bangsawan yang merupakan mantan kades. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi modal ekonomi, aktor non-bangsawan melebihi aktor bangsawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrain, C. F. (1992). *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Haris, S. (2007). *Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.

- Zuhro, S. (2009). *Demokrasi Lokal (Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali)*. Yogyakarta: Ombak.
- Azis, P. H. (2012). *Dominasi Simbolik Karaeng (Studi Tentang Interaksi Kuasa Bangsawan dalam Perubahan Sosial di Jeneponto Sulawesi Selatan)*. Tesis, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Haboddin, M. (2009). *Karaeng dalam Pusaran Politik (Studi Kasus di Kab. Jeneponto)*. Tesis, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Mas'ud, M. (2015). *Resistensi Kaum Papara (Kelas Jelata) di Kesultanan Buton dalam Masa Demokratisasi*. Tesis, Program Studi Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Razak, F. S. H. (2014). *Bangsawan dalam Politik Lokal (Studi Kasus: Kontestasi Andi Pada Pilkada Kabupaten Pinrang)*. Tesis, Program Studi Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Mappangara, S. (2013). *Demokrasi di Bumi Bangsawan (Studi Kasus di Kabupaten Bone)*. makalah.